



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif # melayani
bangsa
bangsa

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025



Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H.
Bupati Barito Kuala

Herman Susilo, S.M.
Wakil Bupati Barito Kuala

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO KUALA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Segenap masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang kami cintai dan kami banggakan.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, serta salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kami dapat menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 yang merupakan kewajiban Bupati Barito Kuala sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundangan terkait lainnya.

RLPPD disampaikan kepada masyarakat sebagai gambaran mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahan informasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu Tahun 2025.

RLPPD ini juga merupakan jembatan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Masyarakat sehingga dengannya Pemerintah Daerah patut berharap dapat menerima *feedback* atau respon-tanggapan yang membangun dalam rangka untuk memperkaya *Intellectual Capital* yang bermanfaat sebagai modal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepannya.

Dewasa ini kita jamak menyaksikan bagaimana Masyarakat kita geram kepada unsur penyelenggara pemerintahan di berbagai lini pembangunan yang dinilai tidak peka terhadap kondisi rentan sosial masyarakat, tidak amanah dalam mengemban tanggungjawab mengelola kepentingan Masyarakat, kebijakan pemerintahan yang dinilai tidak efisien sehingga berdampak pada keuangan negara yang bersumber dari pajak masyarakat, dan banyak lagi kerawanan sosial lainnya yang apabila tidak diperhatikan dan ditanggulangi secara serius dapat berdampak pada integritas kita sebagai satu kesatuan Masyarakat yang berbangsa dan bernegara, serta potensi konflik dan gap kesenjangan antara Masyarakat dengan pemerintah yang semakin lebar.

Maka dari itu, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini jangan hanya menjadi formalitas kewajiban laporan semata, namun harus mampu mencerminkan tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban serta wujud



pengejawantahan sikap Bela Negara sebagai salah satu upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi serta meridhoi langkah kita bersama. Akhirnya kami sangat berharap bahwa kolaborasi dan sinergitas tetap terjalin utuh dan terus bekerja bersama untuk mewujudkan **KABUPATEN BARITO KUALA "SATU" (SEJAHTERA, AGAMIS, TERPADU, dan UNGGUL)**.

Marabahan, Maret 2026

BUPATI BARITO KUALA



Dr. H. BAHRUL ILMU, S.H., M.H



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	7
1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	8
1.2 Angka Kemiskinan.....	10
1.3 Angka Pengangguran.....	11
1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	12
1.5 Pendapatan Per Kapita.....	13
1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).....	13
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR.....	15
2.1 Urusan Pendidikan.....	15
2.1.1 Capaian Kinerja Outcome.....	15
2.1.2 Realisasi Belanja Urusan Pendidikan.....	16
2.1.3 Permasalahan Yang Dihadapi.....	16
2.2 Urusan Kesehatan.....	17
2.2.1 Capaian Kinerja Outcome.....	17
2.2.2 Realisasi Belanja Urusan Kesehatan.....	18
2.2.3 Permasalahan Yang Dihadapi.....	18
2.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	19
2.3.1 Capaian Kinerja Outcome.....	19
2.3.2 Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum.....	20
2.3.3 Permasalahan Yang Dihadapi.....	20



2.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	21
2.4.1 Capaian Kinerja Outcome	21
2.4.2 Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat	21
2.4.3 Permasalahan Yang Dihadapi	22
2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	22
2.5.1 Capaian Kinerja Outcome	22
2.5.2 Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	23
2.5.3 Permasalahan Yang Dihadapi	23
2.6 Urusan Sosial.....	24
2.6.1 Capaian Kinerja Outcome	24
2.6.2 Realisasi Belanja Urusan Sosial	24
2.6.3 Permasalahan Yang Dihadapi	25
BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	26
3.1 Hasil EPPD Tahun Sebelumnya	26
3.2 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya .	26
BAB IV RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH.....	27
BAB V INOVASI DAERAH	30
PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	7
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2025	15
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2025	17
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025	19
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025	21
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Trantibum Linmas Tahun 2025	22
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2025	24
Tabel 4. 1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	28
Tabel 4.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	28
Tabel 5.1	Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025	30



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2021 – 2025	9
Grafik 1.2	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2021 – 2025	10
Grafik 1.3	Tingkat Pengangguran di Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2021 – 2025	11
Grafik 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2021 – 2025	12
Grafik 1.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2021 – 2025 (dalam Juta Rupiah).....	13
Grafik 1.6	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2021–2025	14



BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Barito Kuala
 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,40	72,05	0,91
2.	Angka Kemiskinan	4,36	4,31	-1,15
3.	Angka Pengangguran	3,41	3,23	-5,28
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,01*	5,27**	5,19
5.	Pendapatan Per Kapita	34.289,88*	36.344,83**	5,99
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,272	0,269	-1,10

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala, 2026

Catatan : *angka sementara

**angka sangat sementara

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kinerja serta keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pada Tahun 2025, IPM Kabupaten Barito Kuala kembali mengalami peningkatan menjadi 72,05 dengan kategori Tinggi. Capaian ini meningkat sebanyak 0,65 poin dibandingkan Tahun 2024 dengan laju kinerja 0,91 persen. Dengan capaian tersebut, tren peningkatan IPM selama 2021–2025 menunjukkan konsistensi perbaikan kualitas pembangunan manusia di daerah.

Peningkatan IPM Tahun 2025 terjadi pada seluruh dimensi pembentuk IPM, yaitu :

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (UHH)

Pada Tahun 2025, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat menjadi 72,85 tahun, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 72,52 tahun. Rata-rata peningkatan UHH selama lima tahun terakhir sekitar 0,30 tahun per tahun.

2. Dimensi Pengetahuan (HLS dan RLS)

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 meningkat menjadi 12,58 tahun, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 12,56 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,92 tahun pada Tahun 2024 menjadi 8,05 tahun pada Tahun 2025.

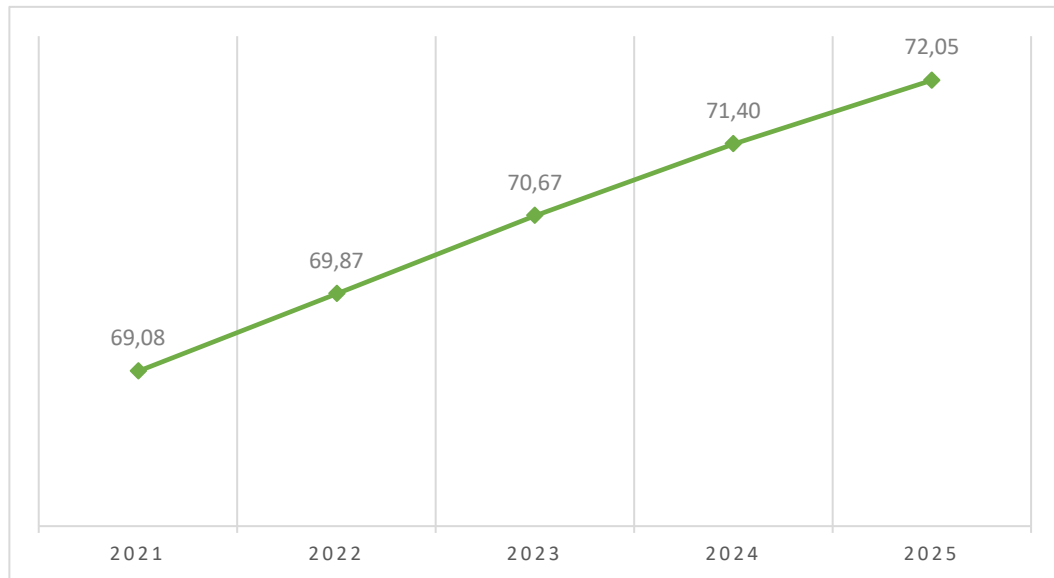
3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran Riil Per Kapita (d disesuaikan) juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2025, pengeluaran riil per kapita meningkat menjadi Rp. 11.685.000,- (*Sebelas Juta Enam ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*), dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 11.168.000,- (*Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Rata-rata pertumbuhan pengeluaran riil per kapita selama periode 2021–2025 tercatat sekitar 3–4 persen per tahun.



Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Barito Kuala selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 – 2025 dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala
Periode Tahun 2021 – 2025



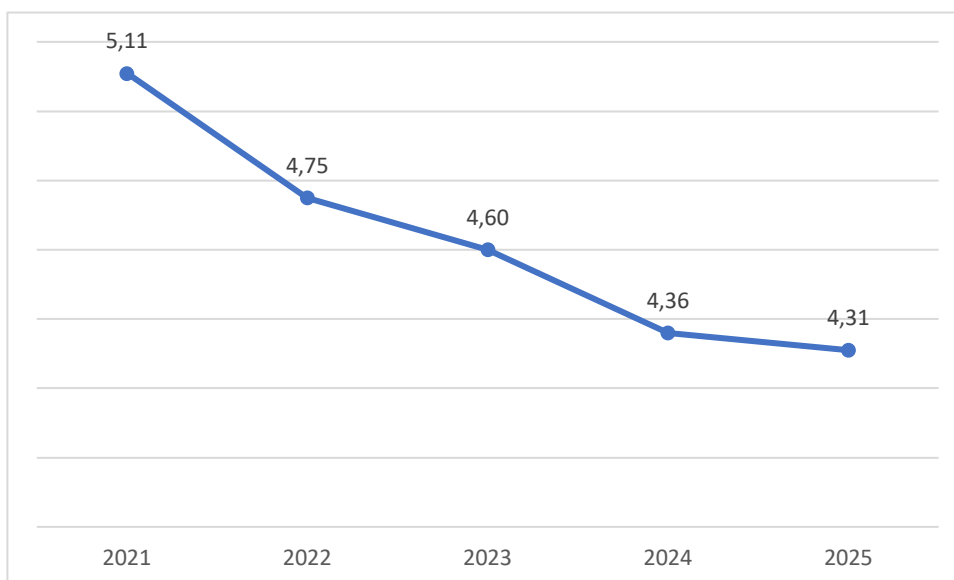
Sumber : BPS, Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2026



1.2 Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2025 tercatat sebesar 4,31 persen, menurun dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 4,36 persen yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta dampak dari pelaksanaan program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Grafik 1.2
 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Kuala
 Periode Tahun 2021 – 2025



Sumber : BPS, Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2026

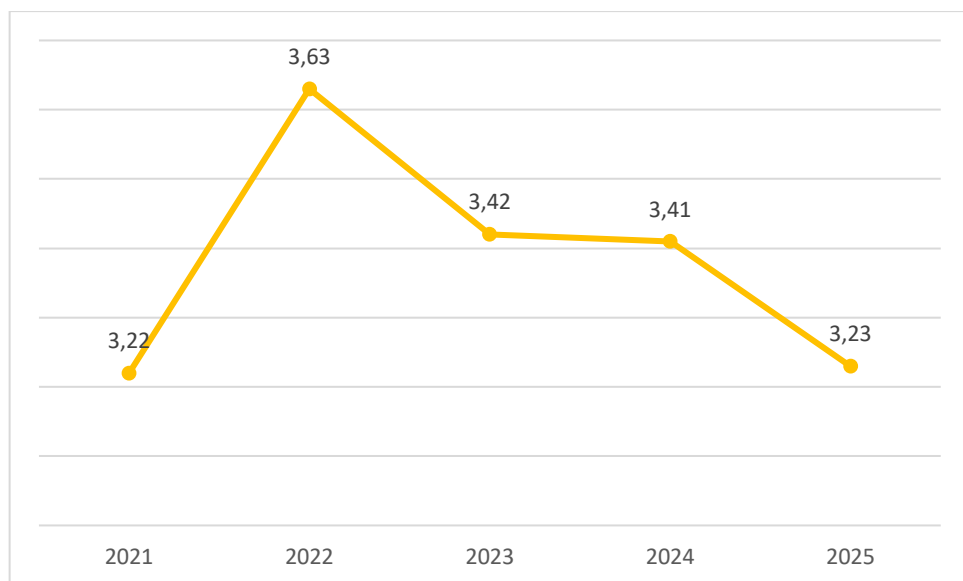


1.3 Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan serta kinerja perekonomian daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja pada suatu wilayah. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan kecenderungan menurun pada akhir periode.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Kuala selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 – 2025 dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 1.3
 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Barito Kuala
 Periode Tahun 2021 – 2025



Sumber : BPS, Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2026

Pada tahun 2025, TPT menurun menjadi 3,23 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat pada angka 3,41. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di daerah cenderung terkendali dan relatif rendah. Secara umum, perkembangan ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Barito Kuala mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

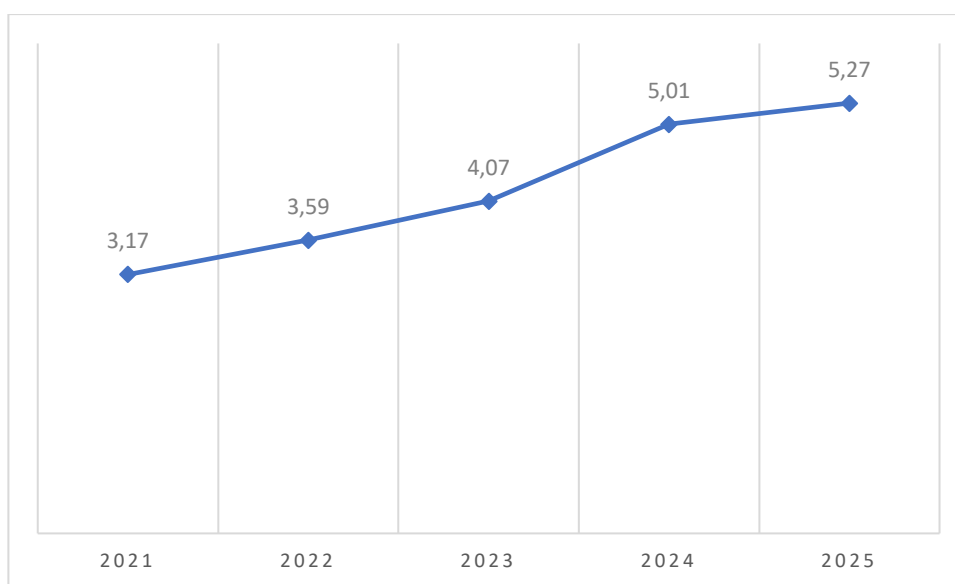


1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah. Indikator ini mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah dari tahun ke tahun.

Grafik 1.4
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala
 Periode Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS, Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2026

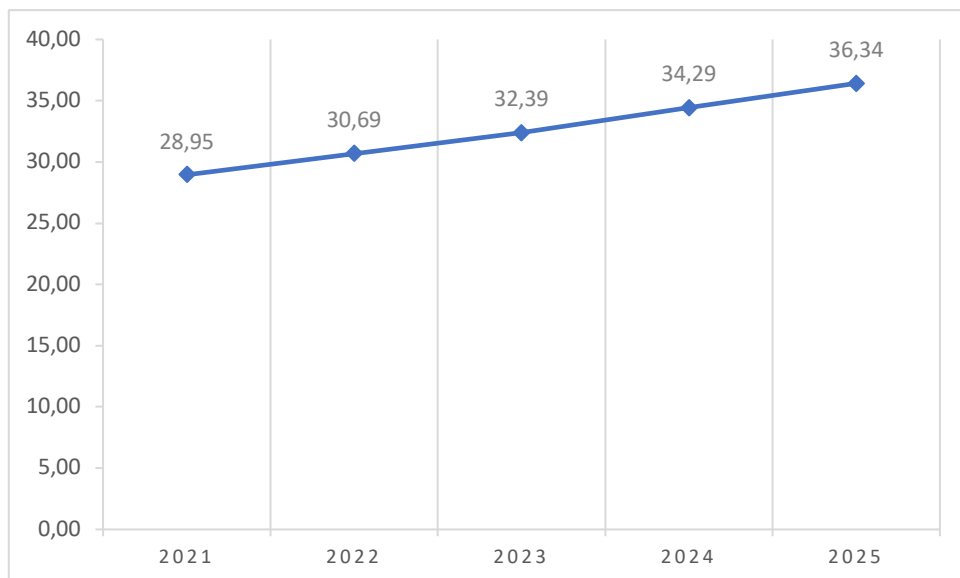
Secara umum, tren peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Kuala berada pada jalur yang positif dan stabil. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan tahun 2024 menjadi 5,27 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang, didukung oleh meningkatnya investasi, aktivitas perdagangan, serta berkembangnya sektor-sektor unggulan daerah.



1.5 Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, pada tahun 2025 nilai PDRB per kapita Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 36.344,83 ribu rupiah atau 36,34 juta rupiah. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2021–2025, PDRB per kapita Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren peningkatan yang konsisten.

Grafik 1.5
 PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Kuala
 Periode Tahun 2021 – 2025 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: BPS, Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2026

1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

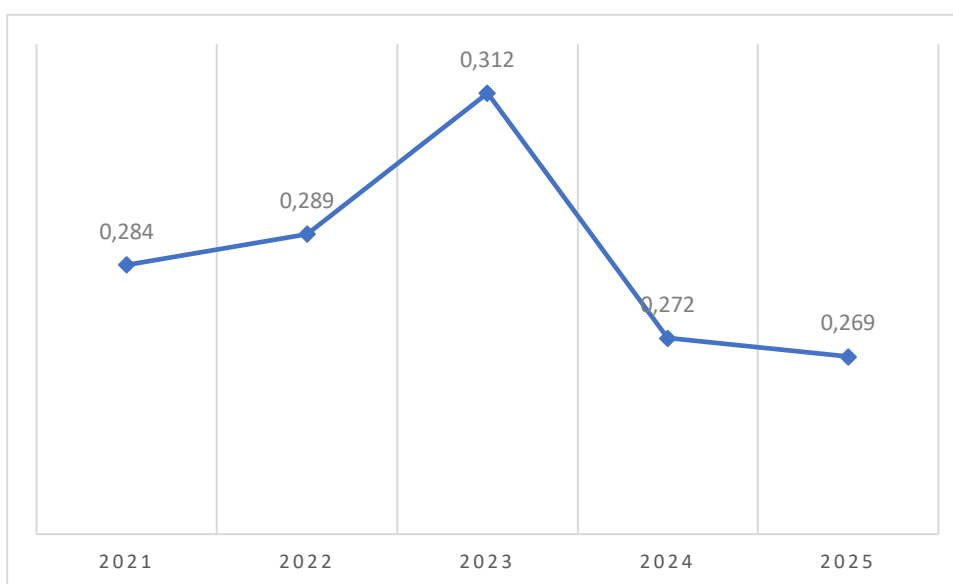
Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi, sedangkan nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya menjaga tingkat ketimpangan pendapatan agar tetap berada pada tingkat yang terkendali melalui



berbagai kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif, seperti peningkatan akses pendidikan dan keterampilan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Grafik 1.6
 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala
 Periode Tahun 2021–2025



Sumber: BPS, Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2026

Sebagaimana terlihat pada Grafik diatas, perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Barito Kuala selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif namun cenderung menurun pada dua tahun terakhir. Pada Tahun 2021 Indeks Gini Ratio tercatat sebesar 0,284, kemudian meningkat menjadi 0,289 pada Tahun 2022 dan 0,312 pada Tahun 2023. Selanjutnya pada Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,272 dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 0,269. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala relatif rendah dan cenderung membaik, sehingga mencerminkan semakin meratanya hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, yang terdiri dari :

2.1 Urusan Pendidikan

2.1.1 Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan
 Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1.	Persentase Anak Usia 5 s.d 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	92,91%	91,66%
2.	Persentase Anak Usia 7 s.d 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	97,41%	97,20%
3.	Persentase Anak Usia 7 s.d 18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	85,81%	83,82%
4.	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	-	36,19%
5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	27,41%



2.1.2 Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebesar **Rp. 512.616.658.582,-** (*Lima Ratus Dua Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Enam ratus Lima puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) dengan program utama yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, yang terdiri dari kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2.1.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan, yaitu :

- 1) Perlunya regulasi yang mengatur koordinasi antar SKPD terkait penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
- 2) Masih ditemukannya Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan faktor penyebab antara lain faktor ekonomi, pernikahan dini, disabilitas, dan lain-lain;
- 3) Diperlukan komunikasi, penyebaran informasi, dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pendidikan.
- 4) Diperlukan optimalisasi potensi anggaran untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Satuan Pendidikan.



2.2 Urusan Kesehatan

2.2.1 Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1.	Persentase Kematian ibu	-	0,10 %
2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	-	8,53 %
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,10 %	100 %
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,11 %	99,64 %
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,68 %	98,72 %
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	86,19 %	100 %
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,74 %	100 %
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,71 %	93,23 %
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,01 %	100 %
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	100 %
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	100 %



2.2.2 Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebesar **Rp. 305.387.111.092,-** (*Tiga Ratus Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sebelas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*) dengan program utama, yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

2.2.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan, yaitu:

1. Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan guna mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. Diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar;
3. Diperlukan komunikasi, penyebaran informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan.



2.3 Urusan Pekerjaan Umum

2.3.1 Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,12 %	66,04 %
2.	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	67,50 %	46,68 %
3.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	73,17 %	72,62 %
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,76 %	78,25 %
5.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	54,28 %	11,32 %
6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	0	0
7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100 %	100 %
8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	100 %
9.	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74,72 %	72,96 %
10.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	-	0



2.3.2 Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebesar **Rp. 171.338.479.491,-** (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puuh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), dengan program utama, yaitu :

- 1) Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- 3) Program pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- 4) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- 5) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
- 6) Program penataan bangunan Gedung;
- 7) Program penataan bangunan dan lingkungannya;
- 8) Program penyelenggaraan jalan;
- 9) Program pengembangan jasa konstruksi; dan
- 10) Program penyelenggaraan penataan ruang.

2.3.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum, yaitu:

- 1) Demografi penduduk di Kabupaten Barito Kuala yang tersebar dengan jarak antarpemukiman yang berjauhan menyebabkan perencanaan penyediaan akses air minum memerlukan investasi yang besar, khususnya untuk pembangunan jaringan perpipaan;
- 2) Pada tahun 2025, Kabupaten Barito Kuala tidak memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor air minum dan sektor sanitasi;
- 3) Sebagian besar budaya masyarakat yang pada umumnya masih bergantung pada sungai sebagai pusat aktivitas rumah tangga, khususnya untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK).



2.4 Urusan Perumahan Rakyat

2.4.1 Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %
2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	62,63 %	104,86 %
3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	13,79 %	1,75 %
4.	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	58,00 %	96,67 %

2.4.2 Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja urusan perumahan rakyat di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebesar **Rp. 53.835.325.070,-** (*Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah*) dengan program utama, yaitu :

- 1) Program pengembangan perumahan;
- 2) Program kawasan permukiman;
- 3) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
- 4) Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).



2.4.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perumahan rakyat, yaitu :

- 1) Keterbatasan jumlah tenaga tukang berdampak pada lambatnya progres pembangunan fisik rumah rehabilitasi bagi korban bencana yang menerima bantuan;
- 2) Kesulitan dalam memperoleh lahan pengganti bagi masyarakat yang terdampak relokasi.

2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.5.1 Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Trantibum Linmas
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1.	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	-	0
2.	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %
3.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	100 %	100 %
4.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	63,64 %
5.	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %
6.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %



2.5.2 Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebesar **Rp. 14.061.559.790,-** (*Empat Belas Miliar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan program utama, yaitu :

- 1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; dan
- 3) Program penanggulangan bencana.

2.5.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu :

- 1) Diperlukan penambahan personil Satpol PP, Damkar, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Barito Kuala;
- 2) Diperlukan komunikasi, penyebaran informasi, dan edukasi yang intensif kepada masyarakat tentang mitigasi bencana terutama di wilayah rawan bencana;
- 3) Diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas di bidang trantibum, kebencanaan, dan pemadaman kebakaran sesuai standar.



2.6 Urusan Sosial

2.6.1 Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial
 Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %
2.	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %
4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	100 %
5.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %
6.	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	-	100 %

2.6.2 Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebesar **Rp. 10.581.073.000,-** (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dengan program utama, yaitu :

- 1) Program pemberdayaan sosial;
- 2) Program rehabilitasi sosial;
- 3) Program perlindungan dan jaminan sosial; dan
- 4) Program penanganan bencana.



2.6.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial, yaitu :

- 1) Diperlukan formulasi basis data penerima layanan yang lebih akurat dan komprehensif;
- 2) Optimalisasi potensi anggaran untuk pelayanan sosial;
- 3) Optimalisasi Sumber Daya dan personil dalam penanganan korban bencana;
- 4) Optimalisasi koordinasi antar instansi pada saat tanggap darurat dan paska bencana.



BAB III

HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

3.1 Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun sebelumnya atau tahun 2024 dapat disampaikan bahwa belum ada hasil yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendapatkan peringkat 67 secara Nasional dan peringkat 5 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan skor kinerja 3,3212 dan status kinerja Sedang.

3.2 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 4.A/LHP/XIX.BJM/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, bahwa Kabupaten Barito Kuala berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang berarti sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB IV

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 mencapai sebesar **Rp 1.763.659.331.284,53,-** (*Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Koma Lima Puluh Tiga Rupiah*) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 mencapai **Rp 1.715.903.536.407,55,-** (*Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Koma Lima Puluh Lima Rupiah*).

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 4. 1
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
 Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.679.726.884,00	135.005.388.190,53	96,65	(4.674.338.693,47)
4.1.01	Pajak Daerah	60.867.343.500,00	58.349.464.853,00	95,86	(2.517.878.647,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	7.154.406.680,00	5.925.507.107,00	82,82	(1.228.899.573,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.880.814.259,00	10.050.047.152,00	101,71	169.232.893,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	61.777.162.445,00	60.680.369.078,53	98,22	(1.096.793.366,47)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.577.511.855.500,00	1.583.197.274.779,00	100,36	5.685.419.279,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.476.466.855.500,00	1.467.231.251.248,00	99,37	(9.235.604.252,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.045.000.000,00	115.966.023.531,00	114,76	14.921.023.531,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.456.668.315,00	45.456.668.315,00	100,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.456.668.315,00	45.456.668.315,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.762.648.250.699,00	1.763.659.331.284,53	100,05	1.011.080.585,53

Sumber : BPKAD Kab. Barito Kuala, 2026 (*unaudited*)

Tabel 4.2
 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
 Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
5.1	BELANJA OPERASI	1.278.552.019.256,00	1.201.112.915.566,55	93,94	(77.439.103.689,45)
5.1.01	Belanja Pegawai	786.812.115.711,00	751.250.372.759,00	95,48	(35.561.742.952,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.819.892.490,00	397.006.262.950,55	90,88	(39.813.629.539,45)
5.1.05	Belanja Hibah	50.988.053.055,00	48.933.424.354,00	95,97	(2.054.628.701,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.931.958.000,00	3.922.855.503,00	99,76	(9.102.497,00)
5.2	BELANJA MODAL	412.949.594.504,00	283.467.980.075,00	68,64	(129.481.614.429,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	37.639.501.155,00	1.195.339.464,00	3,17	(36.444.161.691,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.963.366.656,00	48.297.586.499,00	87,87	(6.665.780.157,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.677.708.464,00	91.661.184.716,00	82,07	(20.016.523.748,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	203.717.739.229,00	137.909.600.116,00	67,69	(65.808.139.113,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	521.579.000,00	340.829.000,00	65,34	(180.750.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.429.700.000,00	4.063.440.280,00	91,73	(366.259.720,00)



No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.386.644.636,00	2.382.325.900,00	32,25	(5.004.318.736,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.386.644.636,00	2.382.325.900,00	32,25	(5.004.318.736,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	258.984.787.192,00	228.940.314.866,00	88,39	(30.044.472.326,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.379.947.100,00	2.930.526.938,00	86,70	(449.420.162,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.604.840.092,00	226.009.787.928,00	88,42	(29.595.052.164,00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.957.873.045.588,00	1.715.903.536.407,55	87,64	(241.969.509.180,45)
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
5.1	BELANJA OPERASI	1.278.552.019.256,00	1.201.112.915.566,55	93,94	(77.439.103.689,45)
5.1.01	Belanja Pegawai	786.812.115.711,00	751.250.372.759,00	95,48	(35.561.742.952,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.819.892.490,00	397.006.262.950,55	90,88	(39.813.629.539,45)
5.1.05	Belanja Hibah	50.988.053.055,00	48.933.424.354,00	95,97	(2.054.628.701,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.931.958.000,00	3.922.855.503,00	99,76	(9.102.497,00)
5.2	BELANJA MODAL	412.949.594.504,00	283.467.980.075,00	68,64	(129.481.614.429,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	37.639.501.155,00	1.195.339.464,00	3,17	(36.444.161.691,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.963.366.656,00	48.297.586.499,00	87,87	(6.665.780.157,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.677.708.464,00	91.661.184.716,00	82,07	(20.016.523.748,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	203.717.739.229,00	137.909.600.116,00	67,69	(65.808.139.113,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	521.579.000,00	340.829.000,00	65,34	(180.750.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.429.700.000,00	4.063.440.280,00	91,73	(366.259.720,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.386.644.636,00	2.382.325.900,00	32,25	(5.004.318.736,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.386.644.636,00	2.382.325.900,00	32,25	(5.004.318.736,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	258.984.787.192,00	228.940.314.866,00	88,39	(30.044.472.326,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.379.947.100,00	2.930.526.938,00	86,70	(449.420.162,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.604.840.092,00	226.009.787.928,00	88,42	(29.595.052.164,00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.957.873.045.588,00	1.715.903.536.407,55	87,64	(241.969.509.180,45)

Sumber : BPKAD Kab. Barito Kuala, 2026 (unaudited)



BAB V

INOVASI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barito Kuala telah melakukan inventarisasi serta menghimpun inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pada pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025, Kabupaten Barito Kuala memperoleh skor sebesar 51,38 dengan kategori “Inovatif” serta menempati peringkat ke-171 secara nasional.

Adapun inovasi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah Pelaksana Inovasi Daerah	Nama Produk Inovasi Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badan kesatuan bangsa dan politik	Optimalisasi Verifikasi SPJ dan Rekapitulasi Realisasi Anggaran dengan Aplikasi Sistem Informasi Lembar Verifikasi (SILVER) Berbasis Web pada Bakesbangpol Kab. Barito Kuala	
2.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Penerapan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
3.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	KLINOVA DANSA (Klinik Inovasi Dapat Menyelesaikan Masalah)	
4.	Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Mrb	Si Pepare (Sistem Informasi Pelayanan Kecepatan, Kepastian dan Akurasi Hasil Radiologi Era Digital)	
5.	Dinas Kesehatan	Optimalisasi Promosi Kesehatari Melalui Serial Catatan Julak Haji (CJH)	
6.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	SIP Batola Sistem Informasi POPT Batola	
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Percepatan Penegasan Batas Desa	
8.	Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Mrb	Mars (Majalah Andalan Rumah Sakit)	
9.	Sekretariat Daerah	Lakaś Jadi (Pelacakan Berkas dan Jaringan Administrasi Terintegrasi)	



No.	Perangkat Daerah Pelaksana Inovasi Daerah	Nama Produk Inovasi Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Padu Serasi (Pelayanan Terpadu Penyelesaian Masalah Sertifikat Tanah Eks Transmigrasi)	
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Simanis Laila (Sistem Informasi dan Administrasi UPT Balai Latihan Kerja)	
12.	Sekretariat DPRD	Optimalisasi Layaran Kunjungan Tamu di DPRD Kabupaten Barito Kuala Melalui Sistem Aplikasi E-Baclang	
13.	Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu	Paikat Batola (Peta Informasi Perizinan Rakyat dan Investasi di Barito Kuala)	
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perkawinan Anak Hapus dan Tindakan (Peruk Hati)	
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Perentanan (Perekaman Rentan Adminduk)	
16.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	Barito Kuala Serumpun Festival (BKSF)	
17.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sikapin (Sistem Informasi Kepegawaian Internal) Dengan Pesan Otomatis Whatsapp.	
18.	Dinas Kesehatan	Semangat Baja (Semua Masyarakat Sehat Bangun Jamban)	
19.	Dinas Lingkungan Hidup	Gerakan Penghijauan Daerah Rendah Tutupan Lahan	
20.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Baiman Beda (Barito Kuala Mewujudkan UMKM Naik Kelas Dengan Pembinaan dan pendampingan)	



PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025



PENGHARGAAN KAB. BARITO KUALA
SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH
PENYELENGGARA MAL PELAYANAN
PUBLIK KATEGORI PRIMA OLEH
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Jakarta, 31 Desember 2024



PENGHARGAAN TERBAIK PERTAMA
PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK TAHUN 2024

Banjarmasin, 28 Februari
2025



PENGHARGAAN TERBAIK PERTAMA
PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
TAHUN 2024

Banjarmasin, 28 Februari
2025



PENGHARGAAN OLEH KEPALA BADAN
INTELEJEN NEGARA RI ATAS
DUKUNGAN DAN KERJASAMA DALAM
PROSES PEMBANGUNAN MAKO BINDA
KALSEL

Banjarbaru, 10 April 2025



PENGHARGAAN OLEH KEPALA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN
SELATAN ATAS DUKUNGAN DAN
PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN
KANTOR KEJATI KALSEL

Banjarbaru, 3 Juli 2025



PENGHARGAAN OLEH MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI
KABUPATEN LAYAK ANAK PERINGKAT
MADYA TAHUN 2025

Jakarta, 23 Juli 2025



PENGHARGAAN VISIONER LEADER
AWARD TAHUN 2025 OLEH SEVEN
MEDIA AWARD INDONESIA

Bali, 8 Agustus 2025



PENGHARGAAN TERBAIK I
PEMERINTAH DAERAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TA 2024 YANG BERKINERJA BAIK
WILAYAH KAL-SEL

Jakarta, 17 November 2025



PENGHARGAAN KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BKKBN KATEGORI
KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
MELALUI DUKUNGAN APBD

Jakarta, 26 November 2025



PENGHARGAAN PERINGKAT 2
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BPK TAHUN 2025 DENGAN
PRESENTASE 96,77%

Banjarbaru, 23 Desember
2025



PENGHARGAAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK DENGAN PREDIKAT
"SANGAT BAIK" PADA PEKPPP TAHUN
2024

Jakarta, 31 Desember 2024



PERNGHARGAAN KABUPATEN PEDULI
HAK ASASI MANUSIA

Jakarta, 15 Maret 2025



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa
bangsa

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO KUALA**